

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Inklusi Keuangan

Menurut Bank Dunia (2018), inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi di mana individu dan bisnis memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2016).

1. Aksesibilitas (*Accessibility*) Kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan keuangan formal. Aksesibilitas keuangan adalah fondasi utama inklusi keuangan yang menentukan kemampuan masyarakat untuk masuk dan menggunakan sistem keuangan formal. Bagi masyarakat marjinal di pedesaan, aksesibilitas merupakan hambatan kompleks yang meliputi lima dimensi:

- 1) Fisik (jarak, infrastruktur),
- 2) Ekonomi (biaya, keterjangkauan),
- 3) Administratif (persyaratan dokumen),
- 4) Produk (ketidaksesuaian desain), dan

5) Sosial-Budaya (kurangnya kepercayaan, preferensi informal).

Strategi efektif untuk BPR dalam meningkatkan aksesibilitas meliputi: mendekatkan layanan secara fisik, menyederhanakan prosedur dan persyaratan, mendesain produk yang terjangkau dan fleksibel, serta membangun kepercayaan melalui pendekatan sosial-budaya yang adaptif. Peningkatan aksesibilitas yang holistik ini menjadi prasyarat bagi peningkatan literasi, penggunaan, dan kualitas inklusi keuangan secara keseluruhan.

2. Penggunaan (*Usage*) Tingkat pemanfaatan produk dan layanan keuangan oleh masyarakat. Kualitas (layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat). Penggunaan merupakan pilar kritis yang mengukur sejauh mana aksesibilitas dan literasi telah diterjemahkan menjadi pemanfaatan aktif (*active utilization*) terhadap produk dan layanan keuangan formal. Indikatornya meliputi frekuensi transaksi, diversifikasi produk yang digunakan (tabungan, kredit, pembayaran, asuransi), serta konsistensi penggunaannya (Sarma, 2008). Bagi masyarakat marjinal, penggunaan bukanlah tahap otomatis setelah memiliki rekening. Beberapa faktor penentu penggunaan meliputi:

- 1) Kesesuaian (*Appropriateness*): Produk harus sesuai dengan siklus pendapatan dan kebutuhan riil.
- 2) Kepraktisan (*Convenience*): Proses harus sederhana, cepat, dan dapat diakses secara fisik/digital.
- 3) Persepsi Manfaat (*Perceived Benefit*): Pengguna harus merasakan nilai tambah dibanding sistem informal.

- 4) Dukungan Sosial (*Social Support*): Adanya contoh dari lingkungan sekitar atau dukungan komunitas.

Peran BPR dalam mendorong penggunaan adalah dengan memastikan produk tidak hanya diakses tetapi juga terpakai secara optimal. Strateginya dapat berupa program pendampingan pasca-kredit, insentif untuk transaksi aktif (misalnya, undian bagi penabung rutin), dan integrasi layanan keuangan dengan aktivitas ekonomi sehari-hari (misalnya, pembayaran di pasar tradisional via agen bank).

3. Kualitas (*Quality*): Kesesuaian layanan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Kualitas adalah pilar penentu yang mengukur dampak dan keberlanjutan inklusi keuangan. Aksesibilitas dan penggunaan yang tinggi tidak bermakna jika layanan yang diberikan berisiko, tidak transparan, atau tidak meningkatkan kesejahteraan. Kualitas mencakup:

- 1) Kesesuaian (*Fit*): Tingkat kecocokan produk dengan profil risiko, kebutuhan, dan kapasitas pengguna.
- 2) Transparansi dan Perlindungan Konsumen: Kejelasan informasi (biaya, risiko, syarat) serta mekanisme pengaduan yang efektif.
- 3) Keberlanjutan Finansial (*Financial Sustainability*): Layanan yang tidak membebani pengguna dengan utang berlebihan (*over-indebtedness*) dan tetap sehat bagi penyedia.
- 4) Dampak Sosial-Ekonomi: Kontribusi layanan terhadap peningkatan pendapatan, ketahanan keuangan, dan pengurangan kerentanan.

Peran BPR dalam menjamin kualitas adalah melalui tata kelola yang bertanggung jawab (*responsible finance*). Ini mencakup: audit kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, program literasi yang berkelanjutan (bukan sekali saja), pemantauan dampak sosial-ekonomi bagi nasabah, serta desain produk yang "tidak membahayakan" (*do no harm*). Kualitas (*Quality*) adalah tolok ukur akhir yang menentukan apakah inklusi keuangan bermakna (*meaningful*). Kualitas yang baik ditandai dengan layanan yang sesuai, transparan, berkelanjutan, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan serta ketahanan keuangan pengguna, bukan sekadar meningkatkan angka partisipasi statistik.

2.1.2 Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan suatu konsep multidimensi yang menjadi perhatian global dalam upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan merata. Berbagai definisi telah dikemukakan oleh para ahli dan lembaga internasional:

1. Menurut Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan diartikan sebagai hak setiap individu dan usaha untuk mengakses produk dan layanan keuangan yang bermutu secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan dengan biaya terjangkau (OJK, 2020).
2. Menurut Kurniawan & Vaulia (2022), inklusi keuangan adalah proses untuk memastikan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, dengan biaya terjangkau, secara adil dan transparan.

3. Menurut Sarma (2008) dalam kerangka konseptualnya yang berpengaruh secara global, inklusi keuangan didefinisikan sebagai proses yang memastikan kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal oleh semua anggota masyarakat. Lebih lanjut, Sarma mengembangkan Indeks Inklusi Keuangan yang mengukur tiga dimensi utama:

- 1) Dimensi Akses (*Banking Penetration*): Proporsi populasi dewasa yang memiliki dan menggunakan rekening di lembaga keuangan formal.
- 2) Dimensi Ketersediaan (*Availability of Banking Services*): Ketersediaan infrastruktur keuangan seperti cabang bank, ATM, dan agen perbankan per kapita.
- 3) Dimensi Penggunaan (*Usage of Banking System*): Intensitas dan frekuensi penggunaan produk keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi.

Berdasarkan ketiga perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar memiliki rekening bank, tetapi mencakup aspek yang lebih komprehensif meliputi: aksesibilitas fisik dan finansial, kesesuaian produk, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Inklusi keuangan yang baik ditandai dengan terintegrasinya masyarakat ke dalam sistem keuangan formal sehingga mereka dapat melakukan transaksi, menabung, meminjam, dan mengelola risiko dengan aman dan terjangkau.

Secara sosial, literasi keuangan mempengaruhi kontribusi individu terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk investasi dalam bisnis lokal, partisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan pengambilan keputusan konsumsi yang etis. Tingkat literasi

keuangan yang tinggi juga mendukung inklusi keuangan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan (Sudiyarti et al., 2021).

2.1.3 Tujuan Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghapus semua bentuk hambatan keuangan, untuk mengakses layanan keuangan. Penerapan inklusi keuangan, akan membuka akses orang miskin (orang yang tidak memiliki agunan, tidak memiliki pekerjaan tetap, dapat dipercaya, dan tidak dapat memperoleh kredit) ke layanan keuangan (Aliyani et al., 2024).

Adapun sejumlah tujuan inklusi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, meratanya pendapatan, dan menjaga stabilitas keuangan.
2. Menyuguhkan jasa dan produk keuangan yang dibutuhkan masyarakat.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa itu layanan keuangan.
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
5. Memperkuat kerja sama antar bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan formal atau non formal non bank.
6. Memaksimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk menjangkau cakupan layanan keuangan (Setyaningrat, Mushlihin, & Zunaidi, 2023)

2.1.4 Manfaat Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan memiliki sejumlah manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Selaras dengan tujuannya, salah satu manfaat

inklusi keuangan adalah membantu meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat, memberikan pemahaman pada masyarakat, mempersiapkan rencana keuangan dengan baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Yuliyanti & Pramesti, 2021).

Terdapat empat hal yang menjadi fokus di dalam inklusi keuangan, yaitu:

1. *Product holding* adalah untuk mengetahui produk pembayaran yang digunakan di seluruh negara sebagai sampel penelitiannya, yang termasuk di dalamnya adalah kartu pembayaran dan rekening/ giro, selain itu adalah produk pensiun, produk kredit/ hipotek, dimana indikator tersebut dapat mengetahui apakah pengguna setidaknya menyadari tentang produk atau layanan jasa keuangan yang tersedia secara nasional, selain mereka sadar apakah mereka telah memilih atau menggunakan pilihan produk yang tersedia (Yuliyanti & Pramesti, 2021).
2. *Product awareness* dapat disebut dengan kesadaran konsumen mengenai produk keuangan, atau bahkan mempunyai dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan adalah hal yang sangat penting, karena kesadaran yang akan menjadi pencegah terjadinya kesalahan dalam memilih, selain itu akan membantu penyedia untuk mengetahui permintaan dari Masyarakat (Yuliyanti & Pramesti, 2021).
3. *Product choice* memberikan keuntungan bagi pengguna jika produk keuangan yang mereka miliki terpantau dengan baik dalam inklusi keuangan. Selain itu perlu melakukan perpindahan atau perubahan produk atau layanan jasa yang terlihat memberikan dampak merugikan, jika kita tidak mengelolanya dengan baik. Seperti contohnya adalah menggunakan asuransi yang salah karena tidak sesuai dengan kebutuhan, pemilihan produk kredit dengan bunga yang sangat tinggi, atau yang lainnya (Yuliyanti & Pramesti, 2021).

4. *Seeking alternatives to formal financial services* yang berfungsi untuk mengetahui masyarakat yang dimungkinkan tidak memiliki akses layanan keuangan formal. Pertanyaan tersebut menggambarkan dua hal yaitu, apakah masyarakat beralih ke teman atau keluarganya dalam dukungan keuangan. Yang hasilnya akan mencerikan tentang sejauh mana masyarakat secara aktif menyimpan uangnya dengan cara menabung dan memenuhi kebutuhan hidupnya selain itu juga menunjukkan kemungkinan terdapat ruang atau celah untuk merancang produk keuangan secara sederhana dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Yuliyanti & Pramesti, 2021).

2.1.5 Aksesibilitas, Literasi, Penggunaan, dan Kualitas

Aksesibilitas atau akses merupakan komponen utama dalam menekankan kemampuan untuk menggunakan layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan lembaga keuangan formal. Untuk memahami tingkat akses atas jasa keuangan dibutuhkan analisa, pengetahuan dan potensi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi ketika membuka dan menggunakan rekening bank untuk segala urusan, serta biaya dan lokasi pelayanan bank. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, visual dan komponen setting (Afkari & Maulana, 2021).

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan terkait keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan finansial (Asisi & Purwantoro, 2020). Literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap serta perilaku dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021). Seseorang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik akan lebih mampu memahami lembaga keuangan, produk, serta layanan yang tersedia, termasuk fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban yang melekat pada produk tersebut (Liska et al., 2022;

Suryani et al., 2017). Basmar & S (2021) mengidentifikasi empat dimensi utama dalam literasi keuangan yang mencakup pengetahuan umum keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi, serta investasi. Dimensi-dimensi tersebut memungkinkan individu untuk mengelola keuangan secara optimal dengan memahami aspek-aspek yang mendukung stabilitas finansial (Rahmawati, 2022). (Ariefin et al., 2023).

Penggunaan layanan keuangan mengacu pada seberapa aktif masyarakat memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang tersedia, seperti menabung, mengambil kredit, atau melakukan pembayaran. Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan yang baik mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggunakan layanan keuangan formal. Selain itu, penggunaan layanan keuangan yang meningkat juga dipengaruhi oleh kemudahan akses dan relevansi produk yang ditawarkan oleh bank, termasuk BPR, kepada masyarakat margin (Mohammad H.Holle 2023).

Kualitas inklusi keuangan mencakup sejauh mana layanan keuangan yang digunakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, mudah dipahami, dan memberikan manfaat nyata. Kualitas layanan yang baik ditandai dengan produk yang relevan, transparan, serta adanya perlindungan konsumen. Tingkat literasi keuangan yang tinggi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas interaksi masyarakat dengan layanan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan (Mohammad H.Holle 2023).

2.1.6 Peran Lembaga Keuangan Mikro

Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah memperdayakan masyarakat terutama di bidang UMKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menyediakan akses terhadap keuangan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan usaha UMKM (Arini, 2024). Lembaga keuangan baik bank atau lembaga keuangan bukan bank memiliki kontribusi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Kontribusi bank dan lembaga keuangan bukan bank yaitu dalam bentuk sarana penghimpunan dan penyaluran modal masyarakat secara efektif dan efisien guna membangun tingkat kehidupan masyarakat. (Faidal, 2015). Melalui program-

program pembiayaan dan pendampingan, LKM membantu untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan potensi UMKM. Dengan menyediakan berbagai bentuk layanan finansial dan teknis, LKM tidak hanya memfasilitasi akses ke pembiayaan, tetapi juga menawarkan pelatihan dan bimbingan yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan usaha. Dukungan ini membantu UMKM untuk memperbaiki kapasitas operasional, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar. LKM menawarkan struktur pembiayaan yang lebih mudah diakses, dengan persyaratan yang lebih ringan, sehingga memungkinkan UMKM untuk tetap berkembang meskipun dihadapkan pada keterbatasan modal (Salsabila & Kosasih, 2024).

a) Peran Utama Lembaga Keuangan Mikro

- 1) LKM memberikan kredit, tabungan, dan layanan keuangan lainnya langsung ke masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank formal. Hal ini membantu mengurangi jumlah masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dan memperluas jangkauan layanan keuangan ke daerah pedesaan dan pinggiran.
- 2) Dengan menyediakan pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau, LKM membantu masyarakat marjinal memulai atau mengembangkan usaha kecil, sehingga meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
- 3) LKM berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, dengan memberikan modal usaha dan pelatihan keuangan. Hal ini berdampak pada peningkatan taraf hidup dan kemandirian ekonomi.
- 4) Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam layanan LKM mempercepat inklusi keuangan digital, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

2.1.7 Strategi Pembangunan berbasis Keuangan Inklusif

Pembangunan berbasis keuangan inklusif bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan melalui akses layanan keuangan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok margin.

Menurut World Bank (2018) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ,ada beberapa strategi utama dalam pembangunan berbasis keuangan inklusif:

1. Membuka kantor cabang pembantu dan agen layanan keuangan di desa-desa.
2. Menggunakan konsep LKBB (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) untuk menjangkau daerah terpencil.
3. Menyediakan layanan mobile banking atau agen bank digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
4. Tabungan Pelajar dan Tabungan Umum Mikro: Untuk membiasakan masyarakat menabung sejak dini.
5. Pinjaman Mikro dengan Suku Bunga Rendah: Memberikan akses modal usaha kepada pelaku UMKM tanpa persyaratan berbelit.
6. Kredit Produktif dengan Jaminan Sosial: Diberikan kepada petani, nelayan, dan pengrajin yang tidak memiliki agunan formal.
7. Pengembangan aplikasi mobile banking untuk transaksi tabungan, transfer, dan pembayaran
8. Pelatihan digital kepada nasabah untuk meningkatkan literasi keuangan dan teknologi
9. Melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan langsung ke desa-desa.
10. Kerjasama dengan pihak sekolah/madrasah untuk program literasi keuangan anak usia dini
11. Kolaborasi dengan puskesmas dan koperasi lokal untuk integrasi layanan keuangan dan kesehatan.
12. Program pendampingan usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas dan omset
13. Penyaluran dana *CSR/CSR-like* untuk proyek-proyek ekonomi produktif di desa
14. Membentuk jaringan pemasaran produk lokal melalui marketplace digital BPR.

2.2 Pendekatan Masalah

Inklusi keuangan telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat

berpenghasilan rendah dan marginal, harus memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang aman, berkualitas, serta terjangkau. Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022, tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 85,10%. Namun, ketika data ini diperiksa secara geografis dan demografis, wilayah-wilayah pedesaan dan marginal seperti di Kabupaten Cilacap bagian barat masih menunjukkan ketertinggalan dalam hal akses keuangan formal. Masyarakat margin di wilayah Kecamatan Sidareja, Kedungreja, dan Patimuan umumnya memiliki penghasilan rendah, keterbatasan informasi, dan minimnya akses transportasi menuju lembaga keuangan formal. Hal ini membuat mereka bergantung pada layanan keuangan informal seperti rentenir, arisan, atau simpan pinjam kelompok, yang tidak selalu menjamin perlindungan hukum maupun keberlanjutan ekonomi (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lembaga Terkait & Pelaku Usaha, 2017).

Salah satu solusi yang ditawarkan dalam menjawab permasalahan tersebut adalah peran aktif lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR merupakan institusi keuangan yang dirancang untuk mendukung sektor mikro dan kecil, serta menjangkau wilayah yang tidak dilayani oleh bank umum. PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Citanduy Artha Sidareja merupakan salah satu lembaga keuangan lokal yang memiliki jaringan di wilayah Cilacap barat. Dengan struktur dan pendekatannya yang berbasis lokal, BPR Citanduy Artha dinilai memiliki potensi besar dalam membangun inklusi keuangan secara nyata bagi masyarakat margin. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana BPR Citanduy Artha memainkan perannya dalam meningkatkan inklusi keuangan. Aspek-aspek yang akan dikaji mencakup akses terhadap layanan, keberadaan produk keuangan yang inklusif, kegiatan edukasi keuangan, dan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk menggali fenomena sosial dan ekonomi secara mendalam dari sudut pandang para pelaku dan penerima manfaat. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan secara faktual dan naratif tentang pengalaman masyarakat

marginal serta strategi yang diterapkan oleh pihak BPR dalam membangun akses keuangan di tengah keterbatasan sosial dan geografis. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada kelompok masyarakat marginal yang selama ini kurang dilibatkan dalam sistem keuangan formal, seperti petani kecil, pedagang kaki lima, buruh harian, dan ibu rumah tangga di wilayah pedesaan. Melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam, peneliti akan menilai seberapa besar kontribusi BPR Citanduy Artha terhadap perubahan pola keuangan masyarakat, peningkatan literasi finansial, serta keberlanjutan ekonomi local (Fadli, 2021).

Beberapa program dan produk yang dimiliki oleh BPR, seperti tabungan mikro, kredit usaha rakyat (KUR) versi lokal, dan program edukasi keuangan desa, akan dianalisis untuk mengukur efektivitas serta keterjangkauannya bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPR dalam menjangkau masyarakat marginal, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, kepercayaan masyarakat, serta regulasi perbankan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi lokal. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik inklusi keuangan di tingkat lokal, sekaligus menjadi referensi untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Temuan dari studi ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi BPR sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di wilayah luar dan pinggiran. Secara keseluruhan, pendekatan ini tidak hanya menekankan pada angka dan data kuantitatif, tetapi pada narasi, konteks, pengalaman, dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan BPR Citanduy Artha sebagai motor penggerak inklusi keuangan lokal.

**PERAN PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CITANDUY ARTHA SIDAREJA
DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT MARGIN DI
WILAYAH SIDAREJA,KEDUNGREJA,DAN PATIMUAN**

No	Fokus Masalah	Permasalahan Utama	Dampak terhadap Masyarakat	Peran BPR Citanduy Artha
1	Akses Keuangan Formal	Jarak dan transportasi membuat Masyarakat sulit menjangkau bank	Minimnya rekening bank dan simpanan formal	Layanan keliling dan pembukaan cabang baru di desa
2	Literasi Keuangan	Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang manfaat dan risiko keuangan formal	Masyarakat terjebak rentenir atau tidak punya simpanan	Pelatihan dan sosialisasi dukasi keuangan desa
3	Produk yang Tidak Relevan	Produk bank umum sering terlalu rumit atau tidak sesuai dengan penghasilan harian	Masyarakat tidak tertarik menggunakan jasa bank	Tabungan mikro dan kredit tanpa jaminan bunga ringan
4	Ketergantungan pada Keuangan Informal	Masyarakat lebih memilih arisan, koperasi tidak resmi, dan rentenir	Rentan penipuan, tidak terlindungi secara hukum	Memberikan layanan kredit mikro dan simpanan dengan perlindungan hukum

	Kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan	Banyak masyarakat takut atau curiga terhadap lembaga keuangan	Menurunnya partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam sistem perbankan	Pendekatan kekeluargaan dan pelayanan personal berbasis lokal

Gambar 2.1 Pendekatan Masalah

2.3 Kerangka Teoritis

2.3.1 Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003)

Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi (layanan keuangan) diadopsi oleh masyarakat melalui lima tahap:

1. *Knowledge* (pengetahuan) - masyarakat mengetahui layanan
2. *Persuasion* (persuasi) - terbentuk sikap positif/negative
3. *Decision* (keputusan) - memutuskan mengadopsi atau tidak
4. *Implementation* (implementasi) - menggunakan layanan
5. *Confirmation* (konfirmasi) - evaluasi hasil penggunaan

2.3.2 Teori Akses Keuangan (Claessens, 2006)

Kerangka ini menekankan empat dimensi akses keuangan:

1. *Availability* - ketersediaan layanan

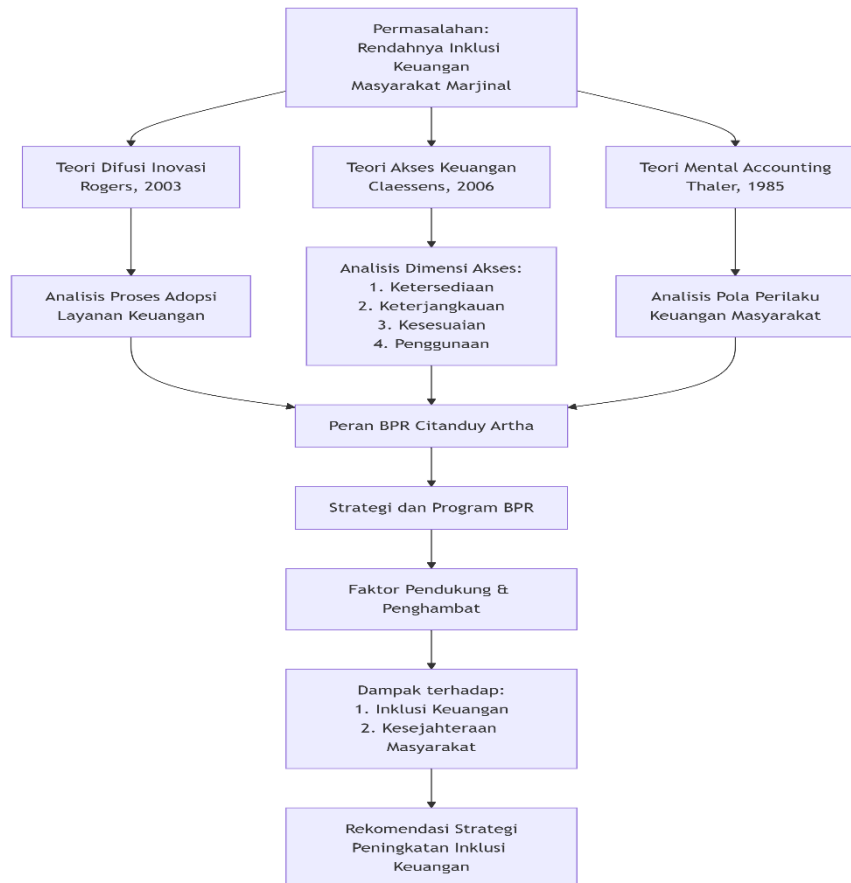
2. *Affordability* - keterjangkauan biaya
3. *Appropriateness* - kesesuaian dengan kebutuhan
4. *Usage capability* - kemampuan menggunakan

2.3.3 Teori Mental Accounting (Thaler, 1985)

Masyarakat marjinal cenderung memiliki pola pengelolaan uang berbeda:

1. Pemisahan uang berdasarkan tujuan (amplop fisik)
2. Prioritas likuiditas daripada investasi jangka Panjang
3. Ketergantungan pada sistem informal karena fleksibilitas

2.3.4 Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Penjelasan Kerangka Pemikiran :

1. Input: Permasalahan rendahnya inklusi keuangan dianalisis dengan tiga teori utama
2. Proses: Teori-teori digunakan untuk menganalisis peran BPR
3. Analisis: Mengevaluasi strategi, faktor pendukung/hambatan
4. Output: Mengukur dampak terhadap inklusi keuangan dan kesejahteraan
5. Outcome: Menghasilkan rekomendasi strategi